PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PROF.IR.H. TATACIPTA DIRGANTARA**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **783186**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.585.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 987 m2/210 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/183 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 1.190 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 2.450 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 1.334 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 336.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA/ 2.4 Q Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, SUZUKI KATANA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 750.000.000**

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	457.110.703
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	10.128.110.703
III.	HUTANG	Rp.	477.882.340
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.650.228.363

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.